

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari  $\pm$  17.504 pulau dengan panjang garis pantai  $\pm$  95.181 km serta luas laut mencakup  $\pm$  70% dari total luas wilayah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 242 juta jiwa pada tahun 2006, sekitar 60% diantaranya tinggal di kawasan pesisir yang juga merupakan lokasi kota-kota dan kawasan industri (Durand, 2010).

Masalah yang dihadapi pada tahun 2020 ini di Indonesia adalah tentang kesehatan. Kesehatan saat ini bukan lagi suatu hal yang bersifat pribadi melainkan sudah menjadi hal yang bersifat umum walaupun Kesehatan masih erat kaitannya dengan kondisi dari seorang individu secara khusus namun memiliki efek social yang tidak terhindarkan. Efek sosial ini dapat menyebar luas hingga melintasi batas negara sampai menjadi fenomena global yang mengejutkan sehingga bukan lagi permasalahan seorang individu namun sudah menjadi masalah bersama dalam masyarakat global yang luas (Kurniawan, 2015).

Awal tahun 2020, Indonesia dan dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina (Handayani, 2020). *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) (WHO, 2020). Awalnya, proses penularan virus ini belum diketahui apakah menyebar diantara manusia namun lambat laun kenaikan kasus yang terus bertambah dan paramedis yang terinfeksi virus ini dari seorang pasien sehingga pasien tersebut dicurigai sebagai super spreader (Asia, 2020). Pada akhirnya dapat dikonfirmasi bahwa penularan oleh virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia (Yuliana, 2020).

Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru (Handayani, 2020). Virus tersebut membuat Indonesia dan seluruh dunia harus menghadapi wabah virus Corona atau COVID-19. Telah diketahui virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah salah satu bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Efek yang ditimbulkan kepada manusia pada awalnya biasanya melalui saluran pernapasan yang dapat menyebabkan infeksi, seperti flu biasa hingga penyakit yang cukup berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus yang menyebar ke seluruh dunia merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang sangat mengejutkan muncul di Wuhan, China pada bulan Desember pada tahun 2019, pada awalnya virus tersebut dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), kemudian setelah diteliti lebih lanjut dikemukakan bahwa virus SARS-COV2 ini menyebabkan penyakit lanjutan yang kita kenal sebagai *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Virus Corona telah menyebar di 106 negara dan wilayah. Infeksi virus COVID-19 itu telah mencapai 110.041 kasus dengan total kematian sebanyak 3.825 jiwa dan pasien yang sembuh sebanyak 61.979 jiwa. Merobaknya Virus Corona berdampak pada banyak hal (Fadli, 2020).

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Semenjak kasus pertama di Wuhan, kejadian peningkatan kasus COVID-19 di China memuncak setiap hari dari akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awal mulanya laporan terbanyak datang dari Hubei dan provinsi di sekitar,

kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman, Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, (Susilo, 2020).

Seluruh organisasi kesehatan di dunia membahas tentang permasalahan virus COVID-19. Salah satunya *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang bidang kesehatannya ikut serta berpartisipasi dalam menangani virus COVID-19. *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara yang didirikan 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sejak berdirinya anggota ASEAN telah meliputi Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Di dokumen pendirian ASEAN (*The ASEAN Declaration/The Bangkok Declaration*) telah menyatakan bahwa tujuan awal didirikannya ASEAN adalah membantu perkembangan ekonomi, sosial, dan kejayaan di Kawasan ASEAN itu sendiri dan juga memperkuat landasan dasar bagi sebuah komunitas yang hirarkinya ingin sejahtera dan damai di Asia Tenggara. (Zulfikar, 2013).

Organisasi ASEAN yang terkait bidang kesehatan yaitu *ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)*. AHMM bertujuan untuk penentuan kebijakan Kesehatan ASEAN dan mendukung keputusan laporan SOMHD dalam pertemuan yang diadakan setiap dua tahun sekali (Edy, 2020). Pada tahun 2020 Indonesia terpilih menjadi ketua *ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)*. Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Kerja Sama Kesehatan ASEAN 2020-2021 bukan tanpa sebab melainkan karena kepercayaan negara-negara lain atas peran aktif Indonesia pada forum kerja sama kesehatan di ASEAN. Setelah dilantik sebagai Ketua Kerja Sama Kesehatan ASEAN 2020-2021, Indonesia merencanakan penyelenggaraan tiga pertemuan, yaitu 15th ASEAN SOMHD pada April 2020 di Yogyakarta, 16th ASEAN SOMHD pada April 2021 dan 15t

ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) bulan Agustus/September 2021. Tema yang dipilih oleh Indonesia adalah *Advancing the Achievements of ASEAN Health Development* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan di kawasan ASEAN. Pada tahun 2020-2021 merupakan perpindahan dari implementasi *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda* (APHDA) dari periode 2016-2020 menuju periode 2021-2025 yang diharapkan akan memperoleh kesuksesan kerjasama kesehatan yang meningkat secara signifikan sehingga dapat mengurangi jarak kesenjangan pembangunan kesehatan di ASEAN. (Meilanova, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan/diselesaikan pada penelitian/ perancangan ini. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

**Bagaimana Peran Indonesia sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN (AHMM) dalam mengatasi Pandemi COVID-19 tahun 2020?**

## **C. Landasan Pemikiran**

Dalam bagian kerangka teori ini, dikemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

### **1. Politik Luar Negeri**

Strategi implementasi untuk mengatur kebijakan luar negeri yang diterapkan sangat tergantung dari pendekatan, gaya, dan keinginan dari pemerintahan yang terpilih. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah-ubah tergantung dari kepemimpinannya. Kebijakan luar negeri tidak seperti politik luar negeri yang cenderung stagnan, kebijakan luar negeri bersifat temporer karena terdapat pengaruh dari kondisi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan dalam negeri, sehingga tergantung dari beberapa kondisi-kondisi itulah kebijakan luar negeri menjadi bagian daripada (*instrument*) dari politik luar negeri itu sendiri.

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles McClelland adalah:

“Hubungan Internasional sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus, informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul di antara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termaksud komponen-komponen (McClelland, 1981).”

Sedangkan menurut K.J. Holsti, Hubungan Internasional didefinisikan sebagai berikut:

“Semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak ia juga mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan internasional, turisme, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etika politik internasional (Holsti, 1987)”

Negara biasanya akan berusaha sekuat tenaga demi mewujudkan tujuan nasionalnya melalui formulasi kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan keluaran dalam politik luar negeri yang berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang telah disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional (Holsti, 1987).

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasi tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

- a. Nilai (*values*) sebagai tujuan dari para pembuat keputusan.
- b. Jangka waktu yang diperlukan guna mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain ada ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*), dan jangka panjang (*long-term*).
- c. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1987).

Dalam melakukan pelaksanaan politik luar negeri, penetapan kebijaksanaan dan keputusan merupakan hal utama yang harus dipersiapkan. Dalam hal ini, pemerintah selaku penentu keputusan akhir juga harus mempertimbangkan faktor nasional atau faktor internal seperti aspirasi konstituen domestik, elemen masyarakat sipil (*civil society*), dan faktor internasional atau faktor eksternal seperti kepentingan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri harus memilih teknik atau instrumen yang cocok demi mencapai tujuan yang telah disesuaikan dengan *national power*.

## 2. Teori Peranan

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa kegiatan politik adalah hasil dari usulan kepada peran yang dipegang oleh aktor politik. Peranan tersebut disebut sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini berdasarkan pada posisi dan kedudukan struktur tersebut. Organisasi internasional hampir semua memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu (Kurniawan, 2015).

Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menjadi aktor perlu menjadi kekuatan transformatif yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dengan membangun mekanisme *access and benefit sharing* dan berperan aktif sebagai negara yang ikut dalam memprakarsai *ASEAN Health Ministers' Meeting (AHMM)* yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi penanganan kesehatan.

Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" yaitu;

"Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi

negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi (Holsti, 1987)”

Menurut Holsti dalam Rudy, ada 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu Negara (Holsti, 1987). Peran tersebut yaitu 1) Benteng revolusi pembebas yaitu pemerintah wajib mengorganisasikan atau memimpin berbagai tipe gerakan revolusioner, 2) pemimpin regional yaitu kewajiban atau tanggungjawab khusus yang dirasakan oleh suatu pemerintah terhadap suatu wilayah atau kawasan, 3) pelindung regional yaitu peran yang menekankan pemberian proteksi bagi wilayah yang berdekatan, 4) bebas aktif yaitu politik pemerintah yang mendukung strategi nonblok tidak lebih daripada afirmasi peran merdeka dalam kebijakan luar negeri, 5) pendukung pembebasan yaitu peran kubu revolusi peran pendukung pembebasan tidak menunjukkan tanggung jawab formal, 6) agen antiimperialis yaitu imperialisme dirasakan sebagai suatu ancaman dan pemerintah menyatakan perjuangan menentang ancaman, 7) pembela kepercayaan yaitu pemerintah memandang bahwa tugas kebijakan luar negeri adalah untuk membela nilai tertentu dari serangan, 8) mediator-pemersatu yaitu pemerintah kontemporer memandang diri mampu untuk bertanggungjawab, 9) kolaborator subsistem regional yaitukategori mediator persatu dalam arti tidak hanya membayangkan antarposisi yang kadang ke dalam kawasan atau isu konflik, 10) pembangunan yaitu menunjukkan suatu tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negarayang sedang membangun, 11) jembatan yaitu peran yang muncul dalam bentuk samar, 12) sekutu yang setia yaitu pembuat kebijakan memandang kebanyakan aliansi dewasa ini sebagai usulan satu pihak, 13) merdeka yaitu peran yang dinyatakan oleh pemimpin sebagai besar negara kontemporer, 14) teladan yaitu peran yang menekankan pentingnya peningkatan

prestise, 15) pembangunan dalam negeri yaitu peran yang mengacu tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional, 16) konsep peran lain yaitu gagasan mengenai pengimbang suatu peran yang bersifat tradisional dalam sejarah diplomasi.

Peranan yang masuk dalam penelitian ini adalah tipe bebas aktif. Prinsip ini tetap digunakan dan seringkali menjadi acuan dalam mengukur kebijakan luar negeri Indonesia. Holsti menyebut sumber utama dalam kebijakan luar negeri adalah konsepsi peran nasional dan *role prescription* atau harapan peran dari lingkungan internasional. Konsepsi peran nasional dapat bersumber dari ideologi atau prinsip dasar politik luar negeri yang dimiliki negara, misalnya Undang – Undang atau peraturan negara. Sumber lain dari konsepsi peran adalah kepentingan nasional. Sedangkan sumber dari harapan peran dapat berasal dari negara tetangga, lingkungan internasional, maupun norma dan hukum internasional yang berlaku. Jika teori ini diaplikasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka politik luar negeri Indonesia bersumber dari konsepsi peran berupa prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional. Sedangkan harapan peran untuk Indonesia muncul dari lingkungan internasional yang berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Perpaduan dua hal inilah yang kemudian menjadi output kebijakan luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan



untuk menentukan pilihan tertentu.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, Pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Wakil Presiden RI pertama Drs. Moh. Hatta mencetuskan gagasannya mengenai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, yaitu negara-negara adikuasa. Aktif artinya dengan sumbangan realitas giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain (Widjaja, 1986).

### **3. Teori Kemitraan**

Kemitraan dapat didefinisikan kemitraan sebagai sebuah hubungan antara individu atau kelompok yang ditandai dengan kerja sama dan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan tertentu. Kemitraan melibatkan sebuah organisasi yang berbasis pada tujuan yang sama, dimana peserta dalam organisasi tersebut saling berbagi baik manfaat dan resiko, serta sumber daya alam dan kemampuannya. Perjanjian dalam kemitraan dapat berbentuk formal maupun nonformal. Organisasi pada umumnya bergabung bersama dalam mengejar kepentingan pribadi yang bisa sama atau berbeda dari para pemangku kepentingan lainnya. Namun, dalam kemitraan harus memiliki dan mengembangkan tujuan mereka secara bersama dengan memahami permasalahan umum dari masalah dan peran dari masing-masing peserta organisasi dalam mengatasi permasalahan yang ada tersebut (Kurniawan, 2015).

Meningkatnya interaksi antar organisasi mencerminkan beralihnya paradigma yang dulunya hanya mengandalkan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam negaranya namun sekarang secara tidak langsung bergantung pada dunia internasional. Pentingnya perubahan dalam pelayanan dunia kesehatan memerlukan

kontribusi yang besar antar anggota mitra organisasi kesehatan. Kesehatan telah menjadi ajang bisnis bagi para pelaku bisnis sehingga diperlukan komitmen bersama bagi mitra organisasi agar mampu menjadi mitra yang tidak hanya mencari keuntungan secara sepihak tanpa memikirkan solusi permasalahan kesehatan secara tepat (Kurniawan, 2015).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

1. Indonesia berperan dengan cara mengambil peran yang lebih aktif untuk meningkatkan respon kolektif penanganan COVID-19 di kawasan ASEAN.
2. Indonesia berperan dengan cara menekankan pentingnya kerjasama dalam menghadapi dampak COVID-19 dan membangun kerjasama antar anggota ASEAN dengan mitra wicara di bidang kesehatan, ekonomi, maupun pariwisata.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang sikap indonesia terkait masalah kesehatan yaitu adanya wabah COVID-19, yang diantaranya adalah :

Untuk mengetahui bagaimana Peran Indonesia sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN (AHMM) dalam mengatasi Pandemi COVID-19 tahun 2020.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Tingkat Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan level analisis *state* dan *system* atau negara-bangsa dan sistem untuk melihat bagaimana negara-bangsa mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan serta sistem yang mengaturnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada bagaimana suatu negara memberikan rangsangan dan respon

terkait Peran Indonesia sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN (AHMM) dalam mengatasi Pandemi COVID-19 tahun 2020.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, analitis, dan metode historis analisis yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Metode Deskriptif Analisis** : Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan dan pengantisipasi yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN (AHMM) dalam mengatasi Pandemi COVID-19 tahun 2020, yang didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat actual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena tersebut, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari bagaimana Indonesia saling memberikan aksi pada saat masalah COVID-19 sedang melanda.
- b. **Metode Historis Analistis** : Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan kerjasama bilateral Indonesia dan ASEAN. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu. Metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomperasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat

dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Alasan mengambil tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu pada tanggal 4 April 2019, Pertemuan Pejabat Tinggi Kesehatan ASEAN (Senior Official Meeting on Health Development/SOMHD) di Siem Reap, Kamboja, telah menyepakati Indonesia menjadi Ketua Kerja Sama Kesehatan ASEAN untuk periode tahun 2020-2021. Pada bulan Maret tahun 2020 COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia.

### **H. Sistematika Penulisan**

- Bab I : Bab ini yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, rumusan masalah dan tentang tujuan kegunaan penelitian, serta dilengkapi kerangka teoritis dan hipotesis.
- Bab II : Bab ini akan dibahas mengenai Dinamika Diplomasi Kesehatan Indonesia
- Bab III : Tinjauan Umum tentang ASEAN dan Badan Sektoral Kesehatan ASEAN (AHMM).
- Bab IV : Peran Indonesia sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN (AHMM) dalam mengatasi Pandemi COVID-19 tahun 2020.
- Bab V : Penutup dari penulisan penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan dari data yang telah di ambil dan di teliti.